

BAB III

PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO KAB. TANJAB BARAT

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada 5 (lima) tahun ke depan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan profesional dibidang Teknologi informasi dan komunikasi.
2. Belum optimalnya Pembangunan Infrastruktur Dasar Jaringan Internet dan Intranet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Terbatasnya Sumber daya Aparatur yang trampil dan profesional dibidang pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
4. Belum optimalnya fasilitasi kegiatan Komisioner Informasi Publik dan Komisioner Penyiaran.
5. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi dan Website yang telah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Belum optimalnya upaya pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat.
7. Belum optimalnya penerapan E-Government di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan SDM Aparatur di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			Bimbingan Teknis yang bersertifikasi guna meningkatkan Kopetensi Aparatur di Bidang TIK		Belum Optimalnya Jumlah SDm yang memiliki kopetensi di Bidang TIK
	Jumlah pegawai dengan kompetensi Teknis yang terbatas		Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai	Kebijakan Penempatan Pegawai	Masih kurangnya pegawai secara kualitas dan kuantitas
Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi	Telah terbangun WIFI di Lingkup Pemerintah Tanjung Jabung Barat		Belum maksimalnya pelayanan terhadap penggunaan WIFI di OPD		Belum optimalnya dukungan dana/anggaran
	Website OPD Kab. Tanung Jabung Barat sebanyak	Belum ada Pergub yang menjadi acuan/SOP	Perlu membentuk Kepbbut/Perbut Tanjab Barat untuk dijadikan payung hukum dalam pengembangan dan muatan di website		Unit kerja di Pemkab Tanjab Barat masih banyak yang belum memiliki website
Peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Paket lelang (konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya) sudah mencapai 100% kecuali jasakonsultasi	1.UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2.UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE	- Belum adanya komitmen pimpinan daerah tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik; - tidak adanya sanksi yang secara tegas mengharuskan pemanfaatan LPSE - Kebijakan Bupati; komitmen OPD, Pengusaha dan LKPP	Belum optimalnya dukungan dana/anggaran
	Lelang Jasa Konsultansi dilaksanakan tahun 2011	3. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE		- Bimtek jasa konsultansi masih terbatas; - Aplikasi SPSE dari LKPP

	Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar di LPSE Kab. Tanjab Barat sudah mencapai 4359 (tahun 2016)	Pemerintah beserta perubahannya	Sosialisasi, Bimtek, dan Verifikasi	Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Vertikal yang bergabung ke LPSE Jambi	Kekurangan tenaga verifikator, Trainer. Admin dan Helpdesk
Fasilitasi Kegiatan Komisioner Informasi Publik dan Komisioner Penyiaran	1. Telah terselesaikannya sengketa publik oleh KIP. 2. Layanan Rekomendasi Kelengkapan Administrasi dan Teknis Penyiaran	1. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 61/2010 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Informasi Provinsi dan Kab/Kota Keputusan Menkominfo No. 18/2008 tentang Tata Cara Proses Rekomendasi Perijinan Penyiaran di Daerah			
Pemanfaatan Aplikasi yang telah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjab Barat oleh OPD lingkup Pemerintah Tanjab Barat					Belum maksimalnya pemanfaatan Aplikasi dan Websitet yang telah dibangun oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi
pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat.			Pembentukan, Pembinaan & Pemberdayaan KIM belum maksimal karena minimnya Anggaran Diskominfo Tanjab	Pembentukan KIM merupakan kewenangan dari Pemerintah kabupaten/kota	Belum optimalnya Pembentukan dan peran serta Pembinaan KIM di Kecamatan i
penerapan E-Government (aplikasi dan website) di Pemerintah Kab. Tanjab Barat	Telah terbangunnya aplikasi dan website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tanjab Barat		Jumlah Aplikasi dan Website yang mendukung kegiatan dilingkup Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat		Belum optimalnya dukungan dana/anggaran

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam Perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka visi pembangunan yang ingin diwujudkan periode 2016-2021, adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju : Mengandung makna adanya pergerakan kondisi kearah yang lebih baik tergambar dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan berkurangnya angka pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan serta tetap terjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh ditopang oleh produktifitas tinggi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

- Adil** : Mengandung makna bahwa terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- Makmur** : Mengandung makna bahwa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga dapat terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat menurunkan rasio kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
- Bermartabat** : Mengandung makna bahwa terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia yang memiliki harkat dan martabat, sehingga pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu mewujudkan cita rasa dan karya yang nyata.
- Berkualitas** : berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang, tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

- Misi Satu : Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
- Misi Dua : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
- Misi Tiga : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
- Misi Empat : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, menempatkan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika terutama untuk mendukung Misi 1 (satu) yaitu : **“Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas”** dan Misi 4 (empat) yaitu : **“Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 1 dan ke 4 tersebut, maka Program Pembangunan khusus urusan Komunikasi dan Informatika yang akan dilakukan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Urusan Pilihan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain :

- a. Program Layanan Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Opini Publik.
- b. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Program Pembangunan, Pengawasan dan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 3.2.dibawah ini:

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkulatas				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 1 Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas</p> <p>Misi 4 Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung oleh Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan Lingkungan</p> <p>Program Pembangunan, Pengawasan dan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi.</p>	<p>1. Masih terbatasnya infratraktur jaringan komunikasi dan Informatika dilingkup Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Tanjab Barat</p> <p>2. Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program</p> <p>3. Masih terbatasnya infratraktur internet;</p> <p>4. Belum optimalnya pemasangan/Pemban gunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik OPD dan Utama</p> <p>5. Masih rendahnya kemampuan di Bidang TIK</p>	<p>1. Penggunaan jalur infrastruktur komunikasi yang belum optimal di setiap OPD dilingkup Kab. Tanjab Barat</p> <p>2. Masih terbatasnya sarana akses TIK bagi Publik</p> <p>3. Belum dijadikan prioritas program</p> <p>4. Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak & Juknis) penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika</p>	<p>1. Adanya ketersediaan kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan.</p> <p>2. Tersedianya Struktur Organisasi dan Tupoksi yang mendukung penyebaran informasi dan pengembangan TIK.</p> <p>3. Adanya kepedulian pimpinan terhadap pengembangan kinerja berbasis TIK.</p> <p>4. Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur jaringan secara efektif dan efisien serta ketersediaan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat yang terkoneksi secara online dilingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p>
2.	<p>Program Layanan Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Opini Publik</p>	<p>1. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan rekomendasi perizinan penyelenggara penyiaran</p> <p>2. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi publik yang akurat, cepat, mudah dan merata.</p> <p>3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan penyelesaian sengketa informasi publk.</p>	<p>1. Rendahnya motivasi aparat, dunia usaha dan masyarakat dalam penguasaan komunikasi dan informatika</p> <p>2. Belum dijadikan prioritas program.</p> <p>3. Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi</p>	<p>1. Adanya kerjasama dengan LPP TVRI dan LPP RRI</p> <p>2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika.</p> <p>3. Adanya kerjasama dengan Komisi Informasi Kab. Tanjab Barat</p>

3.	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kemampuan aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan website. 2. Belum optimalnya OPD di lingkup Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat memanfaatkan aplikasi dalam penyajian data pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya motivasi aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan website. 2. Rendahnya motivasi aparatur dalam penggunaan komunikasi dan informasi terutama dalam pemanfaatan aplikasi yang sudah ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya website yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur, dunia usaha dan masyarakat untuk mendapatkan informasi. 2. Tersedianya aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur di seluruh OPD lingkup Kab. Tanjung Jabung Barat. 3. Adanya dukungan pimpinan terhadap pengembangan kinerja berbasis TIK.
----	--	--	---	---

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

1.3.1. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019

Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan Komunikasi dan Informatika. Tujuan pembangunan Komunikasi dan Informatika untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

1.3.2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi 2016-2021

Visi dan Misi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tahun 2016—2021 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Jambi Berbasis Teknologi dan Informatika, Berbudaya, Maju dan Sejahtera”

Merealisasikan Visi dan memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan serta apa yang akan dihasilkan, dirumuskan dalam Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang professional di Bidang Teknologi dan Informatika.
2. Meningkatkan kerjasama pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan teknologi.
3. Meningkatkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika.
4. Meningkatkan kualitas akses informasi dan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dalam kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan pengawasan kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi dengan pemenuhan kebutuhan aplikasi dan pengelolaan informasi publik yang akurat.

Bila dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tersebut diatas, dan Visi Misi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, maka beberapa permasalahan yang dihadapi oleh OPD (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat) dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanannya dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kominfo RI,
Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Visi : “ Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui Pembangunan Kominfo Berkelanjutan, yang merakyat dan Ramah Lingkungan, dalam Komunikasi kerangka NKRI				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya dan tersebarnya Informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI	Masih Rendahnya Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kurangnya Koordinasi dalam Penyusunan Program dan Kegiatan	Adanya Kesamaan Fungsi dan Peran
2	Terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika yang optimal	1. Masih terbatasnya Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data dan Rendahnya Kemampuan Komunikasi dan Informatika Aparatur, Dunia Usaha dan Masyarakat 2. Masih Rendahnya Dukungan Keberlanjutan Program	1. Keterbatasan Anggaran 2. Rendahnya Komitmen Pengelola Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Adanya Kesamaan Fungsi dan Peran
3	Tersedianya Standar Alat dan Standar Mutu Layanan serta Mekanisme Pengawasan yang Akuntabel pada Layanan Komunikasi dan Informatika	Belum adanya Standar Mutu Layanan dan Mekanisme Pengawasan	1. Belum ada Regulasi Pengawasan Layanan 2. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya	Kewajiban Perlindungan terhadap konsumen
4	Tersedianya Layanan Konten Informasi yang edukatif mencerahkan dan Memberdayakan Masyarakat	Keterbatasan Ketersediaan Data dan Anggaran	Belum ada SOP tentang Pengelolaan Data	1. Kebutuhan Data 2. Keterbukaan Informasi Publik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Tercapainya Peran serta Aktif Masyarakat dan Lembaga Komunikasi dalam Penyediaan , Penyebaran dan Pemanfaatan Informasi Edukatif, Mencerahkan dan Memberdayakan Masyarakat	Belum Optimalnya Pemanfaatan Komponen Mitra Kerja Dinas Kominfo	1. Keterbatasan Anggaran 2. Rendahnya Komitmen Pengelola Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Adanya Kesamaan Fungsi dan Peran
6.	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
7.	Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional	Belum adanya standarisasi industri dan profesional yang dapat diadopsi	Kewenangan atas hal ini cenderung lebih banyak pada tingkat pemerintah pusat	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
8.	Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika	Dominasi keberadaan dan pemanfaatan produk non domestik	Terbatasnya produk lokal	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
9.	Membangun pencitraan positif Negara Indonesia di mata internasional	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika	Keterbatasan kapasitas sumber daya	Tersedianya media elektronik maupun non elektronik

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah tersebut yaitu **“untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pertambangan yang berwawasan lingkungan”**. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi :

- a. perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka, mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;
- c. perwujudan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
- d. perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;
- e. pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal;
- f. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- g. perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten;
- h. peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- i. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan

- j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) adalah serangkaian Analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (pasal 1 UU No 32/2009 tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Pemahaman ini menunjukkan bahwa KLHS merupakan sebuah kajian atau suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan tak lepas dari isu strategis yang mempengaruhi kinerja industri dan perdagangan, isu strategis tersebut antara lain :

3.5.1. Isu – isu strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Isu – isu strategis yang menjadi perhatian Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.

Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, belum berkembangnya e-government system dan inovasi dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan revolusi mental.

3. Predikat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan.

Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

4. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Demikian pula dengan eksplorasi sumber daya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.

6. Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

7. Letak Tanjung Jabung Barat secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Tanjab Barat ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari **poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).**

8. **Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif** berdampak terhadap harga komoditi unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
9. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan **kedaulatan pangan dan energi** harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.5.2. Isu – isu strategis disektor Komunikasi dan Informatika

Secara umum pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah baik. Hal ini berdasarkan hasil capaian kinerja layanan selama kurun waktu 2010 -2015 yang termuat dalam LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun ada beberapa hal yang menjadi isu-isu strategis yaitu :

1. Rendahnya kualitas SDM Aparatur pemerintah pada Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat bidang TIK;
2. Pembangunan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum mencapai titik prioritas pembangunan daerah.
3. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.
4. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal.
5. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan menuju perubahan budaya kerja yang cepat, tepat dan akurat.
6. Minimnya Infrastruktur dan Sumberdaya di Bidang Teknologi dan Informasi.